

Menolak Bungkam: Analisa Bersama terkait Situasi Pembela Hak Asasi Manusia

Pengantar - Analisa bersama ini dibuat oleh Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai bagian dari kolaborasi dalam mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM di Asia, dan khususnya di Indonesia sejak 2020. Akan terdapat perbedaan angka kasus dan Pembela HAM yang terdampak, khususnya terkait data sebelum tahun 2020, dikarenakan perbedaan dalam metode dokumentasi. Analisa ini bertujuan untuk menyampaikan dan menganalisa pola pelanggaran terhadap Pembela HAM dan mungkin tidak merefleksikan keseluruhan jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan, yang kemungkinan berjumlah lebih banyak dari kasus yang terdokumentasikan di analisa ini.

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) adalah jaringan regional dengan 82 organisasi anggota di 23 negara, yang mayoritas berada di Asia. Didirikan pada tahun 1991, FORUM-ASIA bekerja untuk memperkuat gerakan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, advokasi, pengembangan kapasitas, dan aksi solidaritas di Asia dan sekitarnya. FORUM-ASIA memiliki status konsultasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB serta relasi konsultatif dengan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. Sekretariat regional FORUM-ASIA berlokasi di Bangkok, dan kantor sub-regional berada di Jenewa, Jakarta, dan Kathmandu. www.forum-asia.org

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang lahir pada 20 Maret 1998 awalnya merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. www.kontras.org

Analisa Regional Situasi Pembela Hak Asasi Manusia di Asia (Januari 2019 – Desember 2020)

Di dua tahun terakhir, situasi regional di Asia memberikan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM), di mana risiko-risiko yang sudah ada sebelumnya diperburuk, dan ancaman-ancaman baru bermunculan. Selama dua tahun tersebut, pemerintah di Asia menerbitkan dan menggunakan aturan hukum yang represif, serangan daring yang meluas, dan Pembela HAM di Asia melihat anggota keluarga dan orang yang mereka cintai makin menjadi sasaran penyerangan dan ancaman. Selain itu, pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya pelanggaran terhadap Pembela HAM secara signifikan, dan membuat tantangan baru bagi mereka untuk dapat menjalankan kerja-kerja mereka dengan aman.

Dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020, FORUM-ASIA mendokumentasikan 1.073 kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM di 21 Negara di Asia.¹ Setidaknya ada 3.046 individu terdampak, yang mencakup Pembela HAM, anggota keluarga mereka, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Indonesia merupakan negara peringkat ke lima di Asia dengan jumlah pelanggaran tertinggi, dengan 85 kasus yang tercatat dan setidaknya 255 Pembela HAM terdampak. Namun demikian, data ini tidak merepresentasikan seluruh pelanggaran yang terjadi di Asia, dan hanya berdasarkan data yang dimiliki oleh FORUM-ASIA. Jumlah pelanggaran mungkin lebih tinggi dikarenakan banyak kasus yang kurang dilaporkan (*unreported*).

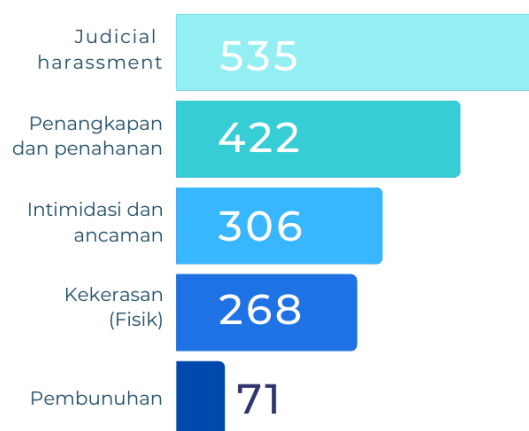
Pelanggaran yang paling umum terhadap Pembela HAM

Dalam periode yang ditinjau tersebut, serangan dengan cara-cara yudisial (*judicial harassment*) merupakan bentuk pelanggaran yang paling umum dengan 535 kasus. Disusul dengan penangkapan dan penahanan sebanyak 422 kasus, yang mana banyak diantaranya dilakukan secara sewenang-wenang. Pemerintah seringkali melakukan kedua bentuk pelanggaran tersebut untuk membungkam dan mengkriminalisasi Pembela HAM karena mengungkapkan perbedaan pendapat mereka. Intimidasi dan ancaman tetap lazim dengan 306 kasus yang tercatat, termasuk setidaknya 29 kasus ancaman pembunuhan.

Dalam beberapa kasus, ancaman tersebut dilakukan terhadap anggota keluarga Pembela HAM. Kemudian kekerasan fisik terjadi di 268 kasus, yang berujung pada 71 kasus kematian Pembela HAM, merenggut nyawa 82 individu di 10 negara. FORUM-ASIA juga mencatat kematian empat Pembela HAM yang sedang menjalani hukuman penjara atau saat dalam tahanan polisi.

Pelanggaran lain yang seringkali tercatat dalam periode peninjauan termasuk vilifikasi/ fitnah (79 kasus), serangan administratif (72 kasus), dan serangan secara daring (48 kasus). Pelanggaran yang terjadi di ranah daring khususnya meningkat dalam dua tahun terakhir, dikarenakan Pembela HAM semakin beralih

JENIS PELANGGARAN
TERHADAP PEMBELA HAM

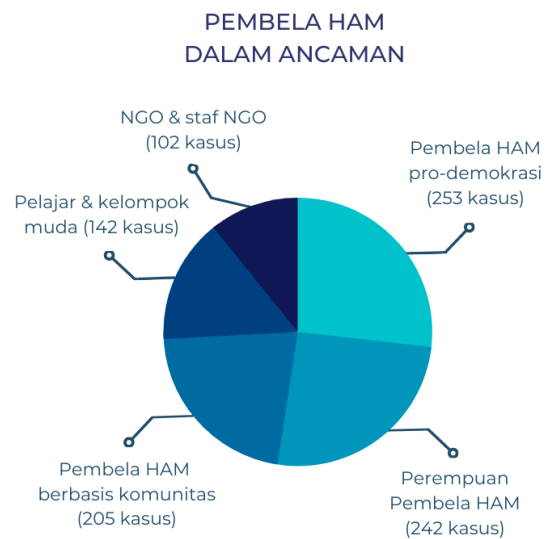


¹ FORUM-ASIA melakukan pemantauan dan dokumentasi secara reguler terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap Pembela HAM di Asia. FORUM-ASIA juga mengelola Asian HRD Portal, di mana seluruh kasus yang didokumentasikan terekam di database khusus. Portal tersebut dapat diakses di: <https://asianhrds.forum-asia.org/>

menggunakan ruang daring untuk melakukan pekerjaan mereka, khususnya di masa pandemi. Serangan dan gangguan secara daring kerap menasar akun media sosial Pembela HAM, sedangkan kantor media dan situs web organisasi masyarakat sipil seringkali mengalami penutupan sementara.

Pembela HAM dalam ancaman

FORUM-ASIA mendokumentasikan 18 kategori Pembela HAM yang menjadi korban pelanggaran. Pembela HAM pro-demokrasi termasuk ke dalam kelompok yang paling diincar, dengan 253 kasus terdokumentasi. Mereka memainkan peran utama dalam menuntut reformasi demokrasi, dengan kelompok muda dan pelajar memimpin gerakan di banyak negara di Asia. Perempuan Pembela HAM (WHRD) yang seringkali menjadi sasaran bukan hanya karena kerja-kerja yang mereka lakukan, tetapi dikarenakan identitas gendernya, menyusul ketat dengan 242 kasus.



Sebanyak 205 kasus terdokumentasi terhadap Pembela HAM lingkungan. Jumlah pelanggaran yang dilakukan korporasi terhadap kelompok Pembela HAM ini terus meningkat, dan seringkali mereka bersekongkol dengan aktor negara. Kelompok Pembela HAM lainnya yang sangat diincar termasuk pelajar dan kelompok muda (142 kasus), dan organisasi masyarakat sipil serta staf mereka (102 kasus).

Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan tambahan kepada Pembela HAM di Asia. Antara Februari dan Desember 2020, FORUM-ASIA mendokumentasikan 119 kasus pelanggaran terkait COVID-19. Angka tersebut merepresentasikan hampir 20% dari total kasus yang didokumentasikan di 2020. Hal tersebut berdampak pada 415 Pembela HAM, termasuk anggota keluarga, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Serangan dengan cara-cara yudisial merupakan bentuk pelanggaran yang paling umum, mayoritas digunakan untuk membungkam Pembela HAM yang bersuara terkait penanganan pemerintah dalam menangani pandemi. Kasus-kasus intimidasi dan kekerasan fisik juga cukup umum, sementara penguasa menyalahgunakan peraturan perundang-undangan darurat dan upaya terkait COVID-19 lainnya untuk memaksakan periode karantina yang semena-mena dan mengawasi Pembela HAM serta membatasi hak atas kebebasan bergerak mereka.

Dengan 34 kasus yang tercatat, pekerja media merupakan kelompok HRD yang paling diincar dikarenakan laporan mereka terkait COVID-19, yang mana mereka mengangkat isu penyimpangan dan korupsi penyaluran dana bantuan, membagikan angka yang tidak resmi terkait pandemi, serta melawan transparansi pemerintah yang rendah.

Aktor negara tetap bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran

Di 2019 dan 2020, aktor negara tetap menjadi pelaku utama atas serangan dan gangguan terhadap Pembela HAM. Mereka bertanggung jawab di 847 kasus pelanggaran, atau hampir 80% dari kasus yang didokumentasi. Polisi sendiri bertanggung jawab atas 585 kasus, setara dengan 55% dari pelanggaran yang tercatat. Lebih lanjut, aktor non-negara merupakan pelaku yang jumlahnya makin meningkat, termasuk bisnis dan kelompok ekstrimis. Secara mengkhawatirkan, aktor negara dan non-negara seperti bisnis dan kelompok ekstrimis, seringkali bersekongkol dalam melakukan pelanggaran terhadap Pembela HAM. Setidaknya dalam 71 kasus pelanggaran yang tercatat di Asia, pelakunya tidak diketahui. Hal ini melemahkan upaya untuk memasitikan akuntabilitas atas pelanggaran dan mendorong iklim impunitas kepada pelaku.

Kultur impunitas ini juga terefleksikan dengan fakta bahwa dari 71 kasus pembunuhan yang tercatat di Asia, pelaku tidak dapat diidentifikasi di 49 kasus, setara dengan 70%. Salah satu contoh kasus emblematis adalah kasus Zara Alvarez, perempuan Pembela HAM dan pekerja organisasi masyarakat sipil di Filipina, yang ditembak mati pada 17 Agustus 2020 oleh pelaku tidak dikenal.² Sebelum pembunuhan, Zara merupakan target dari serangan dan intimidasi yang berulang untuk waktu yang lama. Hingga hari ini, pelaku pembunuhan belum teridentifikasi.

Perkembangan positif

Terlepas dari tantangan yang ada, selama dua tahun terakhir beberapa perkembangan terlihat di berbagai wilayah di Asia. Sebagai contohnya, Parlemen Mongolia mengundangkan undang-undang nasional untuk perlindungan Pembela HAM di April 2021. Terlepas dari beberapa pasal yang bermasalah, undang-undang tersebut merupakan yang pertama dari jenisnya di Asia dan menandakan langkah penting untuk perlindungan Pembela HAM di negara tersebut. Kemudian ada pula beberapa perkembangan positif dalam konteks Lembaga HAM Nasional (NHRI) dalam mendukung pembela HAM. Pada Februari 2021, Asia Pacific Forum (APF), jaringan regional yang terdiri dari NHRI dari Asia Pasifik, meluncurkan Rencana Aksi Regional tentang Pembela HAM, yang menentukan agenda aksi untuk NHRI yang merupakan anggota APF. Rencana Aksi Regional tersebut mencakup rangkaian aksi regional dan nasional yang akan diimplementasikan oleh APF dan anggotanya hingga 2025, untuk meningkatkan penghormatan terhadap Pembela HAM.³

Dua tahun terakhir juga menyaksikan penguatan inisiatif-inisiatif solidaritas antar Pembela HAM, melalui aliansi lintas regional yang melawan represi dan otoritarianisme. Secara khusus, kelompok muda dan gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa mendemonstrasikan ketangguhan dengan mengadaptasikan kerja mereka terhadap tantangan yang dibawa oleh ruang publik yang makin terbatas. Metode-metode inovatif diadaptasi agar mereka dapat melanjutkan kerja-kerja HAM, termasuk dengan menggunakan ruang daring dan media sosial untuk memobilisasi massa yang lebih besar dan membagikan informasi dan pesan utama secara efektif.

Tantangan berlanjut di 2021

Namun demikian, terlepas dari beberapa perkembangan positif, pelanggaran terhadap Pembela HAM tetap terjadi di 2021. Dari Januari hingga Mei saja, FORUM-ASIA mendokumentasikan 360 kasus

² <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/49bx3a5gnq2>

³ https://covenantwatch.org.tw/wp-content/uploads/2015/12/APF_AP_HRD_EN.pdf

pelanggaran di 18 negara di Asia. Dengan 26 pelanggaran yang terdokumentasi, Indonesia menempati urutan kelima tertinggi dari negara-negara di Asia yang dipantau.

Tren regional yang terlihat di 2021 memiliki kemiripan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Serangan dengan cara yudisial masih marak (191 kasus), mencakup lebih dari setengah total pelanggaran yang tercatat. Hal tersebut seringkali dipadu dengan penangkapan dan penahanan Pembela HAM (166 kasus). Kekerasan fisik menyusul dengan 92 kasus, yang mana 34 kasus diantaranya berujung pada pembunuhan Pembela HAM, yang sebagian besar disebabkan oleh represi militer kepada gerakan anti kudeta di Myanmar. Kemudian intimidasi dan ancaman, termasuk ancaman pembunuhan, vilifikasi, dan serangan dan gangguan daring (70 kasus) merupakan pelanggaran yang terus berulang.

Pembela HAM pro-demokrasi merupakan kelompok Pembela HAM yang paling banyak diincar (131 kasus), diikuti oleh perempuan Pembela HAM (93 kasus) dan pekerja media (83 kasus). Sesuai dengan data yang dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir, kelompok Pembela HAM lainnya yang secara khusus terdampak termasuk juga mahasiswa dan kelompok muda (67 kasus), serta Pembela HAM lingkungan (49 kasus).

Situasi Pembela HAM di Indonesia (Januari 2019 – Mei 2021)

Senada dengan kondisi yang terjadi di Asia, situasi di Indonesia dalam 2 tahun terakhir juga tidak kunjung mengalami perbaikan. Mereka yang bekerja dalam sektor pembelaan HAM masih rentan mendapatkan serangan, ancaman, hingga teror. Situasi penanganan COVID-19 pun semakin memperparah pelanggaran terhadap Pembela HAM, khususnya mereka yang kritis mengkritik pemerintah. Pembela HAM seringkali ditangkap secara sewenang-wenang dengan dalih penegakan protokol kesehatan. Sejak awal Januari 2019 – Mei 2021, KontraS mencatat setidaknya terjadi sebanyak 329 peristiwa pelanggaran terhadap Pembela HAM. Pelanggaran tersebut telah membuat 2.705 korban terdampak baik tewas, luka-luka, ditangkap dan lainnya.

Dalam tataran regulasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang belum optimal dalam melindungi kerja-kerja advokasi yang dilakukan Pembela HAM. Saat ini, Undang-Undang (UU) yang secara tegas menjamin perlindungan terhadap kriminalisasi aparat adalah Pasal 66 UU Pengelolaan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – yang menyatakan bahwa Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Akan tetapi kami melihat ada perbedaan signifikan antara sisi normatif dan praktik di lapangan. Pejuang lingkungan masih belum lepas dari bayang-bayang kriminalisasi dan intimidasi seperti tercermin pada kasus Effendi Buhing, seorang tokoh adat di Kinipan.

Effendi ditangkap secara sewenang-wenang oleh Polda Kalimantan Tengah pada 26 Oktober 2020 dengan tuduhan melakukan pencurian gergaji mesin. Padahal penangkapan tersebut tentu berkaitan dengan sengketa lahan hutan antara masyarakat adat Kinipan dengan PT Sawit Lestari Mandiri. Begitupun pembela HAM di sektor lainnya, seperti halnya Ravio Patra. Ia ditangkap pada 22 April 2020 dengan alasan dugaan penyebaran berita onar yang menghasut pada tindakan kekerasan dan kebencian melalui aplikasi WhatsApp.⁴ Sebelum ditangkap, ponsel milik Ravio diretas, sehingga dapat dikatakan bahwa peretasan dan penyebaran pesan provokatif tersebut sebagai upaya untuk mengkriminalisasi aktivis.⁵

Pembela HAM di Indonesia dalam Ancaman

Berdasarkan pemantauan KontraS, pada tahun 2019 setidaknya telah terjadi sebanyak 157 kasus pelanggaran terhadap kerja pembela HAM, mulai dari pembubaran aksi secara represif, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, kriminalisasi serta intimidasi. Adapun pelaku dominan dari sejumlah tindakan kekerasan tersebut yakni Polisi dengan 121 kasus, diikuti oleh swasta (seperti agribisnis) 21 kasus, Pemerintah 20 kasus, dan TNI 6 kasus. Sejumlah peristiwa tersebut mencetak korban dengan jumlah yang sangat tinggi yakni sebanyak 557 orang luka-luka, 26 tewas, dan 713 lainnya ditangkap. Selain itu, kami menyoroti bahwa mahasiswa masih menjadi korban dominan dalam kasus-kasus pembela HAM.

⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/28/07332961/kronologi-penangkapan-aktivis-ravio-patra-versi-polisi-dan-klarifikasi?page=all>

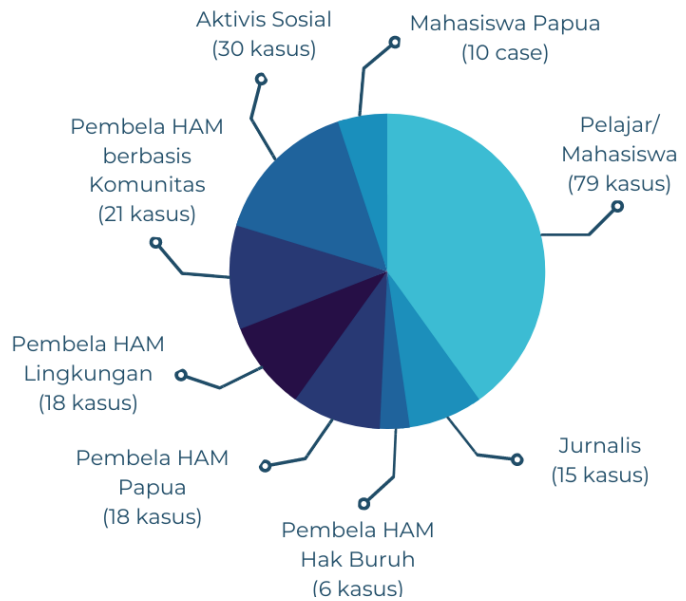
⁵ <https://tirto.id/dugaan-rekayasa-kasus-ravio-patra-cara-baru-kriminalisasi-aktivis-eRXB>

Mahasiswa Turut Menjadi Sasaran

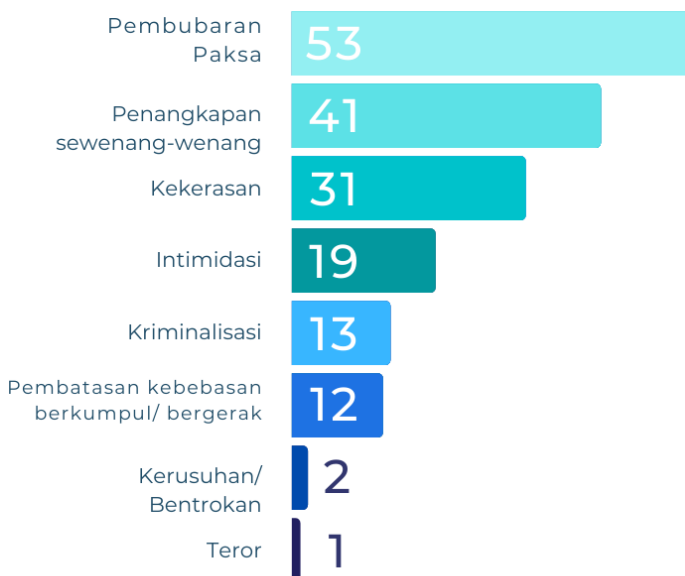
Sebuah pola yang sangat masif terlihat di tahun 2019 bahwa mahasiswa dan pelajar yang turun aksi kemudian distigmatisasi, dibubarkan dengan sewenang-wenang menggunakan kekerasan, setelah itu mereka ditangkap tanpa mematuhi prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Tingginya kekerasan yang menimpa Pembela HAM pun terus berlanjut di tahun 2020. Menurut pemantauan kami, setidaknya telah terjadi 129 kasus pelanggaran terhadap pembela HAM. Adapun dari bentuk pelanggarannya didominasi oleh pembubaran paksa dengan 53 kasus dan penangkapan sewenang-wenang dengan 41 kasus. Dari sejumlah kasus yang ada, menimbulkan sebanyak 238 korban luka, 2 tewas, dan 699 lainnya ditangkap. Kami menyoroti angka penangkapan sewenang-wenang yang tidak mengalami perbaikan, terlebih tindakan tersebut dilakukan pada saat munculnya Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Pola yang terjadi pun berlanjut, korban dominan dari penangkapan sewenang-wenang ialah mahasiswa dengan jumlah ratusan dan biasanya itu merupakan bentuk represi terhadap massa aksi. Kondisi ini membuat masyarakat khususnya mahasiswa semakin takut dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

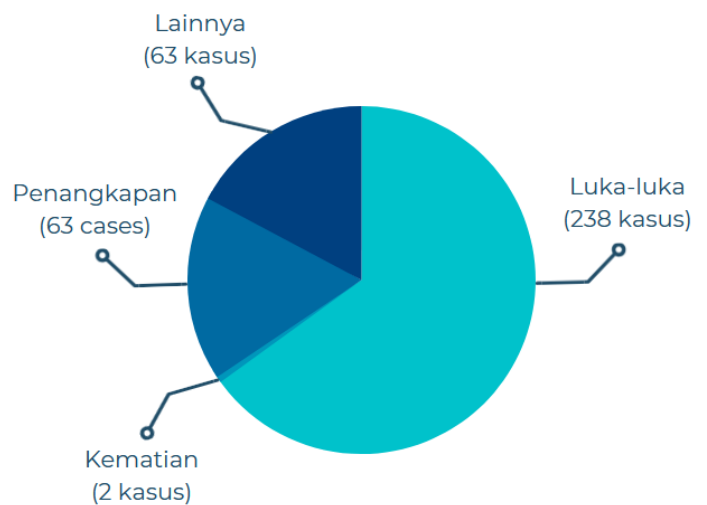
KORBAN PELANGGARAN JANUARI - DESEMBER 2019



PELANGGARAN TERHADAP PEMBELA HAM DI 2020



DAMPAK PELANGGARAN TERHADAP PEMBELA HAM DI 2020



Papua masih menjadi pusat pelanggaran hak asasi manusia

Dilihat dari sebaran wilayah, dari pemantauan tahun 2019 dan 2020, kami menemukan bahwa kekerasan terhadap pembela HAM di Papua selalu menempati provinsi 2 tertinggi.⁶ Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa Negara selalu melakukan pendekatan keamanan dalam mengatasi masalah kemanusiaan yang ada di Papua. Kami juga menemukan banyak praktik-praktik kekerasan terhadap aktivis dan mahasiswa Papua yang bertempat di daerah lain di Indonesia, dimana mereka kerap ditangkap secara sewenang-wenang terutama karena menolak dilanjutkannya otonomi khusus. Terbaru, ada kasus Ruland dan Kelvin yakni 2 orang Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang ditangkap tanpa alasan yang jelas. Sebelumnya kedua mahasiswa Papua tersebut ditangkap atas tuduhan melakukan pengeroyokan serta perampasan barang. Akan tetapi begitu banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus ini seperti barang bukti yang disita tidak berkaitan dengan tuduhan dan tidak diberikannya surat penangkapan. KontraS menduga penangkapan kedua aktivis mahasiswa tersebut sangat dipaksakan untuk melemahkan aktivitas mereka yang sering menolak perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid 2 dan Penolak Daerah Otonomi Baru Pemekaran Provinsi Papua dan terkait dengan isu-isu Hak Asasi Manusia Orang Papua.⁷

Negara Masih Menjadi Pelaku Dominan

Aktor negara tetap menjadi pelaku utama dari pelanggaran terhadap Pembela HAM. Sejak 2019 – Mei 2021, Polisi selalu menempati urutan pertama dalam pelanggaran terhadap Pembela HAM berupa tindakan pembubaran dan penangkapan dengan sewenang-wenang. KontraS juga mencatat bahwa keterlibatan swasta juga meningkat dalam pelanggaran terhadap HRD. Hal ini berkaitan dengan agenda pemerintah untuk mengamankan agenda investasi. Selain itu, permasalahan impunitas juga masih begitu mengakar. Kekerasan yang dilakukan tidak diikuti oleh penegakan hukum yang akuntabel dan berkeadilan. Pelaku biasanya lepas dari hukuman atau hanya menjalani mekanisme internal seperti sidang etik dan disiplin saja.

Kekerasan Terhadap Jurnalis

Jurnalis masih menjadi profesi yang sangat rawan terkena pelanggaran. KontraS mencatat setidaknya terdapat 60 jurnalis yang mendapatkan pelanggaran seperti intimidasi, teror, pengusiran perampasan alat, dan penganiayaan. Terdapat satu kasus besar yakni penganiayaan terhadap Nurhadi, seorang Jurnalis Tempo.⁸ Perlakuan tersebut ia dapatkan pada saat melakukan penyelidikan terhadap salah satu kasus suap pajak pada 27 Maret 2021. Nurhadi mendapat perlakuan ditampar, dijepit, dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil laporannya, ia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya. Kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk kegagalan negara untuk melindungi kerja jurnalis sebagaimana telah dijamin dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang Pers.

Masifnya Serangan Digital Terhadap HRD

Dari pemantauan yang berlangsung, kami juga menemukan pola baru dalam 2 terakhir, yakni terdapat serangan digital terhadap pembela HAM. Contoh kasus yang paling mencuat yakni serangan terhadap

⁶ KontraS mencatat pada 2019 daerah dengan pelanggaran tertinggi pada 2019 adalah DKI Jakarta, sementara di 2020 adalah Jawa Barat.

⁷ <https://kontras.org/2021/03/05/segera-bebaskan-2-aktivis-mahasiswa-papua/>

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1461021/pengacara-sebut-2-polisi-jadi-tersangka-penganiayaan-jurnalis-tempo-nurhadi/full&view=ok>

penyelenggara dan narasumber diskusi mahasiswa pada 29 Mei 2020 yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) Universitas Gadjah Mada.

Penyelenggara diskusi dituduh menyebarkan hasutan kebencian kepada pemerintah karena tema diskusi yang diangkat yaitu tentang “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Serangan teror hingga ancaman pembunuhan kemudian menysasar kelompok mahasiswa penyelenggara diskusi, hingga akhirnya diskusi tersebut pun batal dilaksanakan.

Kasus lain serupa juga dialami oleh salah satu pembicara diskusi yang bertemakan; “Diskriminasi Rasial terhadap Papua” #PapuanLivesMatter, yang dilaksanakan di UKPM Teknokra Universitas Lampung, pada Kamis 11 Juni 2020, Tantowi Anwari. Tantowi merupakan jurnalis dari Serikat Jurnalisme Untuk Keberagaman (SEJUK). Tantowi pertama kali menerima ancaman berupa doxing pada 10 Juni 2020, atau sehari sebelum pelaksanaan diskusi. Sebuah nomor Whatsapp yang tidak dikenal mengirimkan foto atau screenshot e-KTP atas nama Tantowi Anwari, yang diikuti dengan ancaman melalui pesan suara dan teks.

Cara ini dikenal sebagai doxing, yaitu upaya mencari dan menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet untuk tujuan menyerang dan melemahkan seseorang. Doxing ini menimpa perempuan pembela HAM Ernawati bersama dengan dua pembela HAM lainnya, yang aktif memprotes Omnibus Law di Yogyakarta dan ironisnya dituduh oleh suatu akun palsu sebagai perusuh karena ada restoran dibakar di sebelah gedung DPRD.

Rentetan kasus di atas pun mayoritas tanpa proses penyelesaian yang berkeadilan. Pelaku dibiarkan lepas tanpa pernah bertanggungjawab. Kami juga menyoroti praktik impunitas sebagai sebab langgengnya praktik pelanggaran terhadap HRD. Kondisi yang menimpa pembela HAM sejauh ini, semakin membuktikan bahwa negara masih gagal memberikan perlindungan.

Situasi Pembela Hak Asasi Manusia di 2021

Memasuki tahun 2021, keadaan tidak juga membaik. Dalam 5 bulan pertama saja, kami telah menemukan sebanyak 43 kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM. Pembubaran paksa menempati angka tertinggi dengan 19 kasus, diikuti penganiayaan 8 kasus dan intimidasi 7 kasus. Jumlah ini tentu saja berpotensi terus meningkat mengingat pemantauan hingga bulan Mei 2021. Adapun pelanggaran terbanyak terjadi di Ibukota Jakarta dengan 12 kasus. Mayoritas kekerasan terjadi karena dalih pandemi dan penegakan protokol kesehatan. Selain itu, kami juga menemukan beberapa tindakan dan pola baru yang semakin masif dilakukan aparat pada tahun 2021. Sejak awal Januari, KontraS mencatat setidaknya terdapat 11 kasus pelanggaran yang dilakukan aparat dengan bentuk pengejaran pengunggah konten, intimidasi untuk menghapus konten, penghapusan mural, dan persekusi pelaku pembuat konten.

Respon dari Komunitas Internasional

Situasi mengenai pembela HAM di Indonesia juga sebenarnya telah menjadi sorotan dunia internasional. Pada 3 Mei 2017, melalui mekanisme Tinjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) di bawah Dewan HAM PBB, Indonesia mendapat 225 rekomendasi dari sekitar 101 negara.

Setidaknya 4 rekomendasi muncul mengenai pembela HAM, yaitu: (1) Mengadopsi legislasi untuk mencegah and melawan intimidasi, represi, dan kekerasan terhadap Pembela HAM, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil; (2) Melanjutkan penguatan upaya nasional dan regional untuk melindungi Pembela HAM;

(3) Memfasilitasi kerja-kerja Pembela HAM dan jurnalis di seluruh negeri (4) Meningkatkan upaya untuk memastikan perlindungan jurnalis dan pembela HAM. Akan tetapi, setelah lebih dari 3 tahun rekomendasi tersebut dikeluarkan, kami tidak melihat adanya komitmen untuk menjalankan hal tersebut.

Harapan dan Tantangan

Dalam 2 tahun terakhir peran kelompok muda dan mahasiswa masih menjadi aktor utama dalam mempromosikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Mereka menaruh perhatian besar terhadap isu korupsi, hak asasi manusia, dan pembuatan regulasi bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, mahasiswa juga merupakan kelompok dengan sasaran pelanggaran paling banyak dengan perlakuan pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang. Adapun mahasiswa masih menjadi sasaran kelompok terbanyak dengan jumlah 202 orang terkena pelanggaran selama 2 tahun terakhir.

Akan tetapi satu hal yang menggembirakan adalah di beberapa Universitas begitu sering diadakan diskusi publik untuk meningkatkan perhatian mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan hak asasi manusia.